



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN  
PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/  
ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK  
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**DIANA RIZKY**  
NIM. 11727201272

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**2021 M / 1442 H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid’19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 Covid-19)”*** yang ditulis oleh:

Nama : DIANA RIZKY

NIM : 11727201272

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021  
Pembimbing Skripsi

**Basir, SHI., M.H.**  
NIK. 130 217 026



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)."* yang ditulis oleh :

Nama : **DIANA RIZKY**

NIM : 11727201272

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Di Munaqasahkan Pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua

**Dr. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris

**H. Henrizal Hadi, LC., M.Si**

Penguji I

**Lya Angraini, SH., M.H**

Penguji II

**Asril, SH., M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan Pilkada(BAWASLU) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan peran Bawaslu di Kabupaten Pelalawan dalam pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 pada penyelenggaraan pilkada 2020, mendeskripsikan apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan narasumber Bawaslu( Badan Pengawas Pemilihan Umum) kabupaten Pelalawan yang mencakup ketua dan komisioner. Subyek penelitian ini adalah Ketua Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu dan Koordinator Divisi Pengawas, humas& Hubal dan Divisi Hukum, data&informasi dan Panitia Pengawas (PANWASCAM) Pilkada. Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, studi kepustakaan.

Peran Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan ialah melakukan upaya pengurangan/ meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Pandemi covid'19 dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Pengawasan ini diperlukan agar setiap tahapan dan proses Pilkada berjalan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang ada. Bawaslu sangat berperan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang demokratis. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Pada masa Pandemi covid'19 yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pelalawan :a. Karena kesadaran hukum peserta para kadidat pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah rendah; b. Ketidak tahuan terkait aturan yang berlaku, karena itu partai politik punya peran melakukan pendidikan politik; c. Adanya berbagai cara dari pasangan calon untuk persaingan “konflik” yang dilembagakan dalam rangka merebut kekuasaan yang bersifat “persaingan” dalam Pemilihan Kepala Daerah; d. Kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, dan masyarakat belum mengetahui peraturan baru , yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020.

**Kata Kunci:** Peran, BAWASLU, Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pilkada, Covid



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid’19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk yang terkasih, Ayahanda Maksum, S.E dan Ibunda Yusmaini, S.Sos kakanda Sumitha Syafitri, S.E, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan uraian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Firdaus, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Muslim S.Ag, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Basir, SHL., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Kepada Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat memudahkan penulis sehingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Kepada Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Kepada Staf dan pegawai Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang sudah memberikan pelayanan administrasi selama penelitian ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

11. Teman seperjuangan saya Edo Asmawan, M.A.Ihsan S.H., Bang Tegar Siregar S.H., Novita Yola, Silvi Ayu Fitri, kakak Aulia Roza S.Ak, Yolanda Wulandari. Yang sudah menemani saya selama dikampus serta membantu memberikan motivasi, menemanin, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman Ilmu Hukum angkatan Tahun 2017, yang telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama.
13. Dan juga teman-teman KKN Desa Pangkalan Kerinci tahun 2020 yang juga telah membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan saya insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

**DIANA RIZKY**  
**NIM. 11727201272**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum di Pelalawan.....	18
B. Visi dan Misi .....	23
C. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota .....	24
a) Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi.....	26
b) Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal.....	27
c) Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa .....	29
D. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota .....	31
E. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Bawaslu.....	33
B. Pemilihan Umum.....	35
C. Konsep Demokrasi.....	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



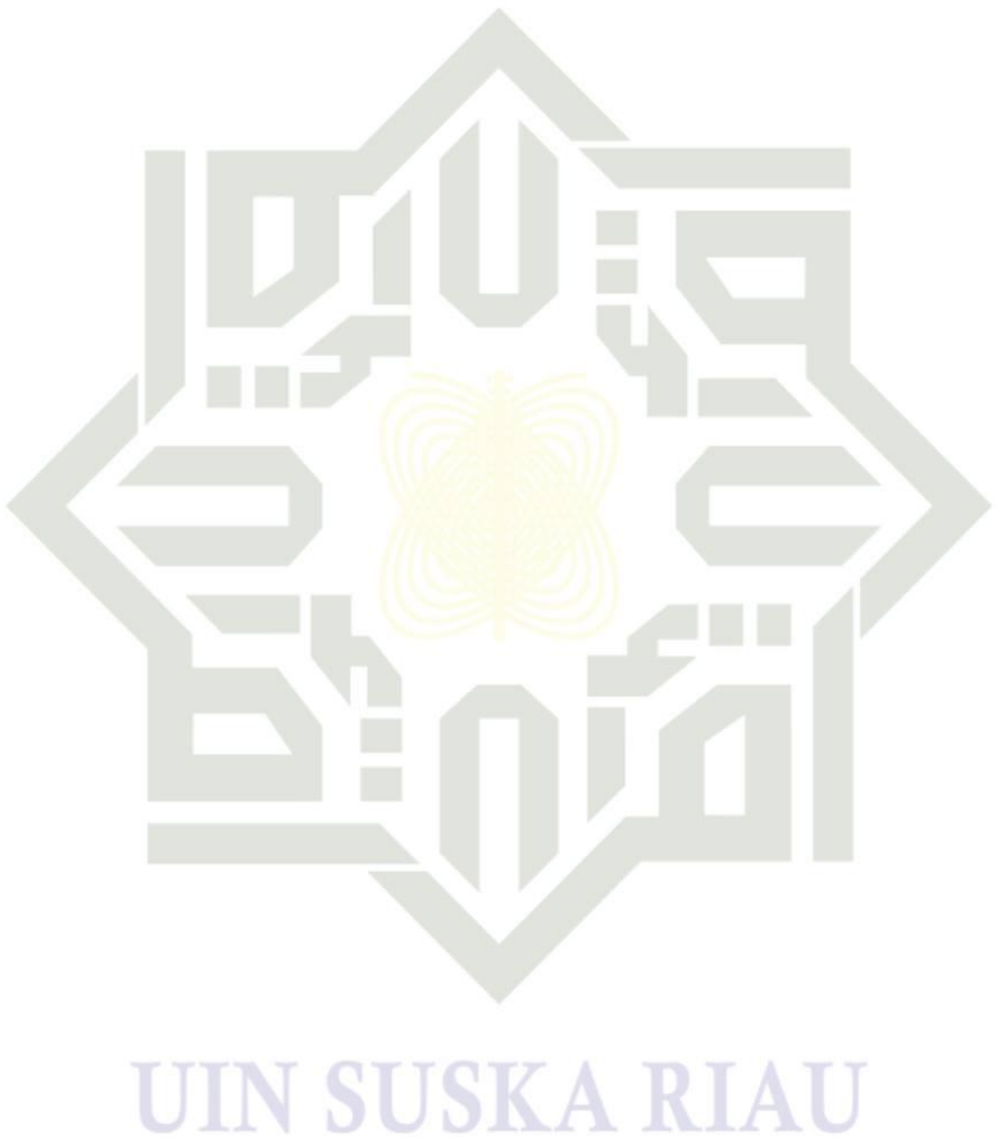


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) .....	46
E. Protokol kesehatan.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan 2020 Berdasarkan Undang-Undang PKPU Nomor 13 Tahun 2020.....	60
B. Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid'19 yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B.Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

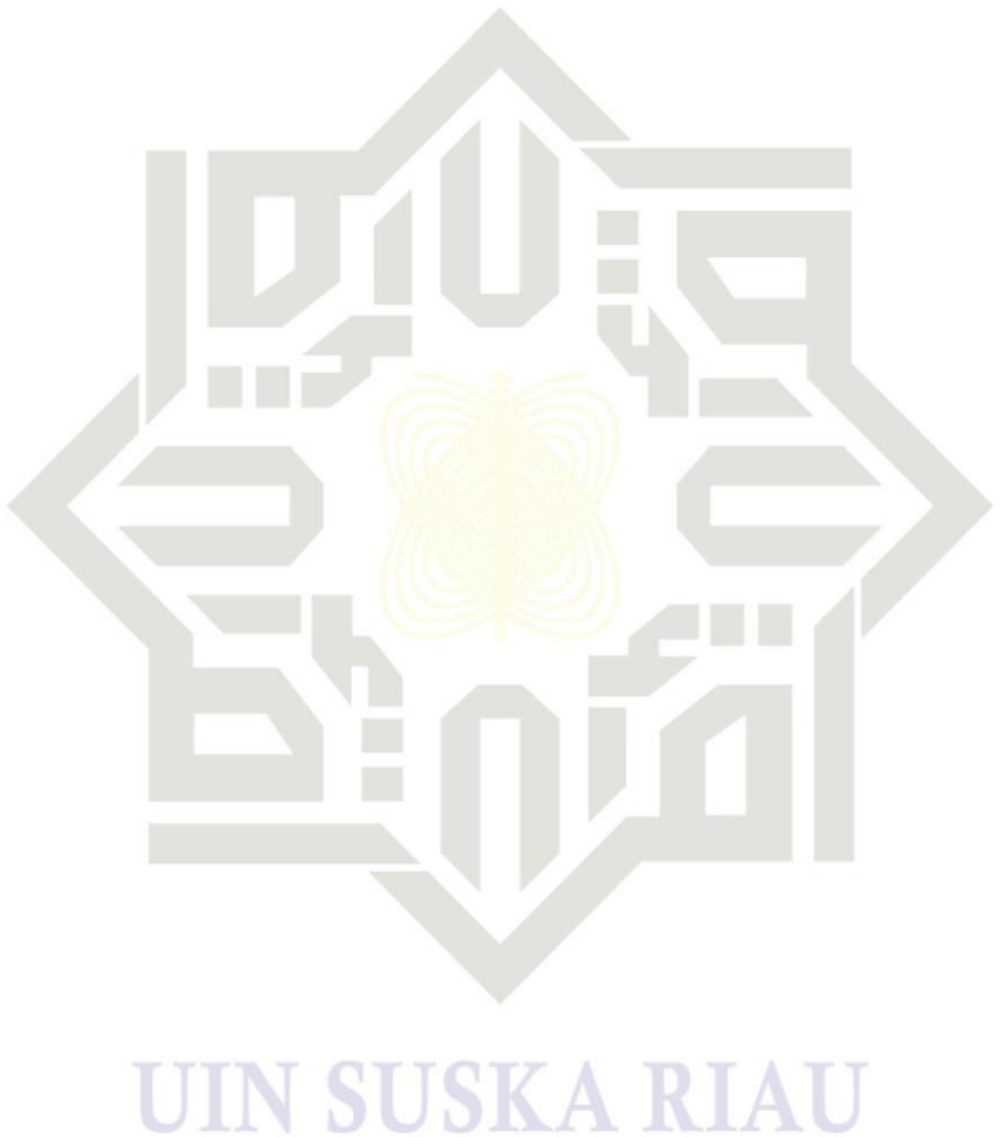
TABEL 1.1.....	14
TABEL II.1.....	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1.....	32
------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dapat terpelihara.<sup>1</sup> Arti penting sebuah hukum adalah hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum lain secara sistematis.<sup>2</sup> Hukum yang dibuat pada dasarnya berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, dan masyarakat yang berada di suatu wilayah tidak akan terlepas dari peraturan yang ada di wilayah tersebut. Kaidah hukum mengatur hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah hukum bertujuan untuk kedamaian hidup bersama, ketentraman dan ketertiban hidup bersama.<sup>3</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law*, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya tetap pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, diterapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi

<sup>1</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h.41.

<sup>2</sup> Roy Marthen Moon, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makasar : Keretakupa, 2017). h. 11.

<sup>3</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang – Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1998), h. 23.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kekuasaan belaka (*machsaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditekankan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>5</sup>

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintah negara rakyat yang berkuasa. Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang mendirikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya, termasuk memulai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”<sup>6</sup>

Kedaulatan Negara berada ditangan rakyat, begitulah amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), yang

<sup>5</sup> Ibid.h. 81

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi; “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, kaidah Undang-Undang menerangkan jika praktik kedaulatan diterjemahan dalam bentuk pemilihan langsung di berbagai level pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara, pemimpin daerah, hingga memilih legislator, instrumen dalam pemilihan pemimpin juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, yang menegaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>7</sup>

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1986), h. 538

<sup>8</sup> Moh.Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV.Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988), h.329.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara demokrasi bukanlah sembarang pemilu tetapi Pemilu yang melahirkan kekuasaan dan wewenang bagi pemerintah. Dalam Penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu tahapan Pemilu adalah Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu atas Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>9</sup> Sedangkan tugas Bawaslu telah disebutkan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yakni lembaga penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan melihat dan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.<sup>10</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga tidak merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena pemilihan

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan Pemerintahan Daerah pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat (4) 1945.

Agenda pelaksanaan Pilkada merupakan suatu agenda rutin yang mengandung langkah strategis bagi terciptanya transisi politik dan pemerintahan Indonesia di masa depan. Persoalan Pilkada bukan hanya terbatas pada karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun dinamika dan prosesi pelantikan semata. Keutamaan dari adanya Pilkada adalah dalam merangsang keajahteraan dan pembangunan bagi masyarakat di tiap-tiap daerah melalui berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.<sup>11</sup>

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan Pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pilkada. Tahapan fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/ Kota;

<sup>11</sup> Singgih Choirl Rizki dan Yusuf Adam Hilman, Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada serentak di tengah Covid 19, Volume 4, No 2, 2020), h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di wilayah Kabupaten / kota.<sup>12</sup>

Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *Staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat (Asshiddiqie, 2012) termasuk tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020.<sup>13</sup>

Secara historical context, Covid-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan berasal dari salah satu hewan liar yaitu kelalawar.<sup>14</sup> Dampak dari terkenanya Covid-19 bagi individu yang terinfeksi yaitu akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga dapat menyebabkan kematian.<sup>15</sup> World Health Organization melansir data yang berhasil menginfeksi 827.419 jiwa pada 203 negara dengan kasus sejumlah 827.419 dan dengan angka kematian 40.777 jiwa, yang menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Pasal 101 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang tugas Badan Pengawas Kabupaten/Kota

<sup>13</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19, Volume 4, No 1, 2020, h. 122

<sup>14</sup> Yuliana, Corona virus diseases (Covid-19); sebuah tinjauan literature, Jurnal Wellness and Healthy Magazine Vol 2, No. 1, Februari 2020, h. 188.

<sup>15</sup> "Covid-19 Coronaviruses Pandemic," 15 Maret 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>; Wang Zhou, ed., Coronavirus Prevention Handbook (Wuhan: Hubei Science and Technology Press, 2020).

<sup>16</sup> World Health Organization, "Coronavirus," last modified 2020, 15 Maret 2020, [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya Pemilu. Apapun pilihannya, pasti menuai kontroversi. Mencari keputusan yang tepat diantara kedua pilihan ini tidaklah mudah. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap “nekat” melaksanakan rangkaian Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.

Pada dasarnya, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dilaksanakan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan serentak Lanjutan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 88A PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yaitu :

“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat teradanya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.”

Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid'19 dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan adalah pelanggaran administrasi bahan kampanye yang telah disebarkan, Netralitas ASN, pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid'19. Berkaca dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Badan Pengawas Pemilihan Umum pada masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah Tentang :

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini di fokuskan pada Peran badan Pengawas Pemilihan Umum, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu , Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Agenda Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di tengah maraknya studi kasus di Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut ,maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid'19 yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid'19 yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dapat mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Dapat mengetahui apa saja Faktor-Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan.
  - b. Manfaat Praktis
    1. Dapat memberikan data dan informasi bagi pihak-pihak terkait terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19). Serta mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.<sup>17</sup> Sedangkan menurut H.B Sutopo metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan jenis penelitian menggunakan metode Kualitatif melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian hukum sosiologis ( *sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action* ).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan Sultan Syarif Kasim Kabupaten Pelalawan, Riau 28381.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

<sup>17</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2017), h.5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peran Ketua dan komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan dan Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM).
- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum bagi yang melanggar protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>19</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, jurnal-jurnal, artikel, dan internet dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang tugas Badan Pengawas Kabupaten/Kota.
- e. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak 2020.
- f. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan Ilmiah Hukum yang terkait dengan objek penelitian.

<sup>20</sup> Zainuddin Alli, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan Hukum Sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.<sup>22</sup>

**Tabel 1.1**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

NO	NAMA POPULASI	POPULASI	SAMPEL
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan	22 orang	3 orang

Sumber : Data Lapangan 2021

### 6. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

<sup>21</sup> *Ibid*, h.119.

<sup>22</sup> Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol.6 No.2, h. 188-193.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### a. Observasi

Suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung sebagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

##### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atas masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis akan menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Sejarah BAWASLU, Visi dan Misi Bawaslu, Tugas Bawaslu, Divisi-Divisi Bawaslu, Tabel Tugas dan Wewenang Bawaslu, Kewajiban Bawaslu, Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

#### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan Tinjauan Umum Tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Konsep Demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Protokol Kesehatan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid'19 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, dan Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid'19 Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 .

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan

Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyeleggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sebagai lembaga *Ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada dilantik, maka seperti itulah Panwas Kabupaten/Kota yang kita ketahui mengenai Prosedur Pembentukannya.<sup>23</sup>

Seperti kita ketahui bersama bahwa tonggak sejarah pelaksanaan Pemilu pertama kali di tahun 1955, dimana saat itu sama sekali belum mengenal adanya Lembaga Pengawas Pemilu. Keberadaan Lembaga ini baru ada pada Pemilu di tahun 1982, yang dilatari oleh protes yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi/kecurangan yang dilakukan oleh para petugas Pemilu di tahun 1971 dan 1977 yang terjadi secara masif.

Protes ini akhirnya direspon oleh Pemerintah dan DPR yang pada kala itu didominasi Partai Golkar dan ABRI, yang melahirkan gagasan untuk meningkatkan kualitas Pemilu di tahun 1982 dengan memperbaiki Undang-undang. Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu kedalam

<sup>23</sup><https://pelalawan.bawaslu.go.id/perjalanan-terbentuknya-bawaslu-kabupaten-pelalawan/> diakses pada Tanggal 25 Juni 2021





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepanitiaan Pemilu, selanjutnya Pemerintah mengintroduksi adanya Lembaga baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Lembaga atau Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Selanjutnya pada era reformasi tuntutan pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu yang Mandiri dan Independen semakin menguat, maka dengan itu dibentuklah Komisi Pemilihan umum (KPU) sesuai dengan amanat UUD 1945, untuk meminimalisasi campur tangan “Penguasa” dalam pelaksanaan Pemilu. Sedangkan untuk Lembaga Pengawas Pemilu juga berubah dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), hal yang mendasar terkait dengan Lembaga pengawas Pemilu dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang dimana dalam pengawasan Pemilu dibentuk lembaga Adhoc terlepas dari Struktur KPU, mulai lembaga pengawas tingkat pusat hingga tingkat Kecamatan.<sup>24</sup>

Kemudian Lembaga pengawas Pemilu ini dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan setelah melalui proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana putusan akhir menetapkan rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan

<sup>24</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu, menerima Pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran Administrasi, pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik.

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Tentunya hal ini sangatlah “merepotkan” bagi Bawaslu RI ditengah-tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota permanen serta melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menetapkan para komisioner Bawaslu Kabupaten/kota di 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia paling lambat pertengahan bulan Agustus 2018.<sup>25</sup>

Maka dengan pertimbangan diatas melalui Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, Bawaslu RI

<sup>25</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘menugaskan’ kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi masing-masing.

Tim Seleksi inilah yang nantinya melakukan penjangkaran secara terbuka lalu memilih serta menetapkan Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota melalui beberapa tahapan rangkaian mulai pengumuman pendaftaran, penelitian berkas administrasi, tes tertulis, tes psikologi, dan tes wawancara. Selanjutnya dari seluruh rangkaian diatas akan menghasilkan 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan untuk diserahkan nama-namanya ke Bawaslu Provinsi yang selanjutnya akan di Uji kelayakan dan kepatutan, lalu Bawaslu Provinsi mengirim nama-nama calon berdasarkan Peringkat sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Bawaslu RI untuk ditetapkan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen periode 2018 – 2023.<sup>26</sup>

Yang perlu kita pahami bersama bahwa adanya aturan untuk anggota Panwas Kabupaten/Kota petahana untuk pilkada serentak 2018 yang di bentuk berdasarkan Undang-undang 15 Tahun 2011 dapat ditetapkan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi syarat, dengan pertimbangan efisiensi karena dianggap anggota panwas kabupaten/kota petahana sudah lulus untuk tes tertulis serta tes wawancara Tim seleksi pada perekrutan tahun 2017

Dengan acuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adanya perubahan syarat minimal usia 30 (tiga puluh tahun) serta harus melalui Psikologi Tes, maka

<sup>26</sup> Ibid.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka ini tinggal melalui tahapan administrasi dan tes psikologi selanjutnya apabila dinyatakan lulus akan langsung mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing yang akan lebih berupa evaluasi terhadap kinerja selama mereka bertugas , hal inilah yang membedakan dari calon baru.

Namun bagi banyak kalangan Masyarakat hal ini dianggap diskriminatif dan tidak adil dalam proses seleksi perekrutan, dikarenakan bagi para pendaftar yang dari masyarakat umum diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian tes oleh tim seleksi, sedangkan para Panwas Petahana tinggal melakukan Tes Psikologi, selanjutnya langsung uji kelayakan dan kepatutan oleh komisioner Bawaslu Provinsi masing-masing. Ada pula beberapa tanggapan dari sebagian kecil Masyarakat bahwa aturan diatas plus evaluasi bagi Panwas Kabupaten/Kota lebih memihak ke Petahana, serta menutup peluang Masyarakat umum yang bisa jadi dari mereka ada yang lebih memiliki Karakter, integritas, dan kompetensi yang mungkin lebih baik lagi.

Lepas dari opini masyarakat tersebut diatas, tentunya kita berharap banyak pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota agar selalu bekerja secara transparan, akuntabel, serta memperhatikan tanggapan dan masukan masyarakat agar proses rekrutmen ini betul-betul melahirkan individu-individu yang bersih serta mempunyai Karakter diri yang kuat, berkompetensi

Saat masih PANWASLU KABUPATEN PELALAWAN ada 3 (Tiga) Komisioner yang menjabat adapun nama-nama komisioner tersebut adalah :<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta n

1. Muhrur, S.Pi
2. Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I
3. Nanang Wartono, SH.,MH

Setelah menjadi Bawaslu Kabupaten Pelalawan adapun yang menjadi

komisioner berjumlah 5 (Lima) Orang :

1. Muhrur, S.Pi
2. Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I
3. Nanang Wartono, SH.,MH
4. Khaidir, S.IP
5. Kamal Ruzaman, SH

Posisi Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota permanen periode 2018 – 2023, yang nantinya tidak hanya akan menjadi Badan penyeimbang KPU di daerah tetapi juga akan juga menjalankan kewenangan baru baik berupa rekomendasi ataupun putusan yang mengikat KPU kabupaten/Kota demi penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik lagi bagi kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Visi dan Misi

#### Visi

Terwujudnya Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lemabga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> <https://pelalawan.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilihan Umum yang kuat, Mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilihan Umum, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilihan Umum partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;
6. Membangun Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pusat pembelajaran Pengawasan Pemilihan Umum baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

**Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota :<sup>29</sup>**

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadapi;
2. Pelanggaran Pemilu; dan
3. Sengketa proses pemilu;

---

<sup>29</sup> Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas ;
5. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
6. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/kota;
8. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
9. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
10. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
11. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
12. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
13. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dari seluruh Kecamatan;
14. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
15. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota;
16. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota;
17. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/kota  
, yang terdiri atas;
19. Putusan DKPP;
20. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
21. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
22. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
23. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
24. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota;
26. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; dan
27. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>31</sup>

Adapun fungsi pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- a) Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

Divisi yang melakukan fungsi :

<sup>31</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan
4. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS
5. Tata laksana dan kesekretariatan
6. Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
7. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota
8. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:<sup>32</sup>
  - A. sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS
  - B. data informasi
9. Pemantauan dan evaluasi
10. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.
  - b) Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal

<sup>32</sup> Ibid.





Divisi yang melakukan fungsi :<sup>33</sup>

1. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
2. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan
3. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau kerja sama dan hubungan antar lembaga
4. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan
5. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan:
  - a) Program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan
  - b) akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
  - c) penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan
  - d) pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan
6. Hubungan masyarakat
7. Kerja sama dan hubungan antar lembaga
8. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Pemantauan dan evaluasi
10. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar lembaga.

---

<sup>33</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Divisi yang melakukan fungsi :

1. Penyiapan analisis dan kajian hukum
2. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum
3. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan
4. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS
5. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
6. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
7. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota
8. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
9. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu
10. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
11. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
- Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
- Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
  - Hukum
  - Pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
  - Pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
- Pemantauan dan Evaluasi
- Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

**Tabel II.1**  
**Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota**

Tugas Bawaslu	Wewenang Bawaslu
a. Melakukan pencegahan dan penindakan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu khususnya pada pelanggaran protokol kesehatan covid-19;	A. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu;
b. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/ kota;	B. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota C. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- c. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/ Kota;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di wilayah Kabupaten / kota.

pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

D. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

*Sumber : Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

**D. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota :**

- 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## E. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

**Gambar 11.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan**



Sumber: Profil Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tahun 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Umum Tentang Peran Bawaslu

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>34</sup>

Peran dapat diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran. (*role performance*).<sup>35</sup>

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>36</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

<sup>34</sup> <https://kbbi.web.id/peran>.

<sup>35</sup> Edy Suhartomo, *Teori Peran Konsep, Denvasi dan Implikasinya*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>37</sup>

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, posisi.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan wewengannya dalam menangani pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

<sup>37</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**B. Pemilihan Umum**

a) Pengertian Pemilihan Umum secara Konseptual

Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.<sup>38</sup>

b) Pengertian Pemilihan Umum secara Operasional

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan(*representative goverment*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena '*political market*' yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.

c) Azas Penyelenggara Pemilu :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;

<sup>38</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015 ), h. 50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.<sup>39</sup>

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu, antara lain :

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung;
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah;
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa;
4. Sarana rekrutmen politik;
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.<sup>40</sup>

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat,

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

<sup>40</sup> Muhadam Labolo, *Op.Cit.*, h. 53.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilgub atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan disarankan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, pertanggungjawaban tugas, serta pemberhentiannya.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington, Bingham Powel, Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:<sup>41</sup>

1. Pemilihan Umum;
2. Rotasi Kekuasaan;
3. Rekrutmen secara terbuka; dan

<sup>41</sup> Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Kerjasama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), h. 12-13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Akuntabilitas publik.

Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan salah satu kegiatan, yang nilainya *Equivalent* dengan pemilihan anggota DPRS. *Equivalensi* tersebut di tunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan dijalankan dengan cara melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk mekanisme *check and balance*. Oleh karena itu, Pilkada juga bagian dari sistem politik di daerah.

Salah satu sistem Pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas Pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan Pilkada. Dengan kata lain, asas Pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas Pilkada juga berarti jalan atau sarana agar Pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan Pilkada.<sup>42</sup>

Dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat

<sup>42</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 206



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut

<sup>43</sup>.

#### 1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara

#### 2. Umum

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

#### 3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa saja. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kepentingan dan kehendak hati nuraninya.

#### 4. Rahasia

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa saja suaranya diberikan.

#### 5. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 207

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana saja.

d) Konsep Pemilihan Umum dalam Masa Pandemi Covid'19

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Selain berdasarkan alasan tersebut, terdapat pertimbangan mengenai kepentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur bicara karena akan memerlukan waktu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>44</sup>

Pasal 201 dan pasal 202 disisipkan 1(satu) pasal, yakni pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat(1).
2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

<sup>44</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta politik JIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **Konsep Demokrasi**

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>45</sup>

Demokrasi itu sendiri secara etimologis berasal dari dua kata Yunani yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan”. Sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat” atau “kedaulatan rakyat”. Kata *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan pengertian tentang demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. R. Kranenbrug memaknai *demos* dan *kratos* sebagai cara memerintah oleh rakyat.<sup>46</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut Padmo Wahjono, berpendapat bahwa : “politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka kalimat “kedaulatan berada di tangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna

<sup>45</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>46</sup> Ni’ matul Huda, *Negara Hukum, dan Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>47</sup>

Pemahaman politik hukum tentang kedaulatan rakyat di atas sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik, dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>48</sup>

Dalam hal terjadi transisi demokrasi, pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3(tiga) prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pemilu tersebut. Prakondisi tersebut antara lain :

1. Modernitas dan Kesejahteraan

Modernitas dan kesejahteraan merupakan prakondisi yang mempunyai peran vital bagi pelaksanaan pemilu di suatu negara.

2. Budaya Politik

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah

<sup>47</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, ( Jakarta: Cet. II, Ghalia Indonesia, 1986), h. 160.

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, ( Yogyakarta : Cetakan ke II Liberty, 2003), h. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.<sup>49</sup>

#### 3. Struktur Sosial Masyarakat

Prakondisi ketiga adalah struktur sosial yang ditandai dengan keberadaan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti akademisi, pekerja media massa, Kelompok menengah, aktivitas masyarakat sipil yang secara konsisten mendukung demokrasi.<sup>50</sup>

Salah satu parameter perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia pada saat ini tercermin dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di lain pihak Henry B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi itu harus didasari oleh beberapa norma yakni :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapatan, kepentingan, serta tingkah laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

<sup>49</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : suatu Model Pengantar* ( Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 26.

<sup>50</sup> Muhadam Labolo, *Op.Cit.*, h. 48



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rakyat menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat. Menurut J.J Rousseau yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum, yang dianggap mencerminkan kehendak atau kehendak umum.<sup>51</sup>

#### Demokrasi Indonesia

Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern, sehingga pemerintah dimanapun termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu. Di era Soekarno kita mengenal sebutan “Demokrasi Terpimpin” yang semula dimaksudkan “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun dalam pelaksanaannya telah bergeser menjadi “dipimpin oleh Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi’ dengan wewenang melebihi yang ditentukan oleh konstitusi. Di era berikutnya, yakni era Orde Baru kita mengenal sebutan “Demokrasi Pancasila”. Dengan sebutan seolah-olah hanya demokrasi Orde Baru saja yang benar-benar pancasila, sementara demokrasi-demokrasi sebelumnya tidak. Meskipun semula Demokrasi Pancasila itu dimaksudkan sebagai koreksi total atas sistem-

<sup>51</sup> Seohino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 160



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sistem sebelumnya yang “menyimpang”, pada praktiknya ia telah memperlihatkan masih banyaknya distorsi, baik dalam retorika maupun dalam praktik. Demokrasi model Orde Baru ini dikritik sebagai mekanisme kekausaan untuk menyembunyikan kecenderungan praktik-praktik demokratis di dalamnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, demokrasi sangat terkait dengan pemilihan umum. Dalam situasi dan kondisi negara-negara di dunia saat ini, maka demokrasi tak langsung atau demokrasi melalui perwakilanlah yang secara *real* dapat dijalankan. Untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang *representative* itulah pemilihan umum merupakan sarananya. Tidak adanya pemilihan umum yang *competitive*, yang jujur dan adil, dapat dianggap sebagai kurang atau tidak adanya demokrasi. Pemilihan umum sendiri oleh Bingham Powell disebut sebagai *instrumen of democracy*.<sup>52</sup>

#### D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pengawasan Pemilihan Umum di setiap tingkatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum adalah mengidentifikasi dan memerikan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilihan Umum

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 11.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum.

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum, terdapat 3(tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum, yaitu :<sup>53</sup>

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Pemilihan Umum diluar tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak Pidana pelanggaran dan /atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012.

4. Perselisihan hasil Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> Topo Santoso, *Op. Cit.*, h. 300.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada buku keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 diatur tentang pelanggaran Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Pemilhan Umum yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum, sekaligus menegaskan komitmen Pemilihan Umum/ pemilihan kepala daerah sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang independen yaitu :<sup>54</sup>

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau Undang-Undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah;
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



## Definsi Pengawasan

Menurut R.Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan-pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)  
pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan.
2. Pengawasan pada saat kerja Berlangsung (*Concurrent Control*)  
pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan ketika pekerjaan dilaksanakan.
3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back control*)  
pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

Adapun teknik Pengawasan Menurut Sarwoto antara lain :

1. Pengawasan Langsung  
Pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :
  - a. Inspeksi Langsung  
Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan,dilakukan.
  - b. Observasi Ditempat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

##### c. Laporan Ditempat

Laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

##### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dari jauh-jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

##### a. Laporan Tertulis

Laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

##### b. Laporan Lisan

Laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

##### a. Tujuan Pengawasan

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya itu maka Badan Pengawas Pemilihan

Umum (BAWASLU) diberikan 6 (enam) kewenangan, yakni :<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum,
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. Menyelesaikan sengketa pemilu;
- d. Membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### E. Protokol kesehatan

#### 1. Covid-19

Virus Corona termasuk superdomain *biota*, kingdom *virus*. Virus Corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo *Nidovirales* semua virus dalam ordo *Nidovirales* adalah *non-segmented positive-sense RNA Viruses*. Virus corona termasuk dalam familia *Coronaviridae*, sub familia *Coronavirinae*, genus *Betacoronavirus*, subgenus *Sarbecovirus*. Pengelompokan virus pada awalnya diilalah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus *Sarbecovirus* meliputi Bat-SL-CoV dan 2019-nCoV, Bat-SL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Parwanto, "Virus Corona(2019-nCoV) penyebab COVID-19", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3 (No.1), 2020, h. 1.

UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Saif Kasim Riau

Covid-19 adalah penyakit akibat virus Corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, Cina yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit Covid-19 yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Infeksi Covid-19 juga menyebabkan kematian yang cukup tinggi di berbagai negara. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel CoronaVirus atau SAR-Cov-2.<sup>57</sup>

Dalam upaya mencegah penularan covid-19 yang semakin meluas. Pemerintah menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan berbagai langkah pencegahan seperti melakukan *physical distancing*, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, meningkatkan informasi yang memadai dan mudah dipahami agar dapat turut serta melaksanakan beragam upaya pencegahan Covid-19 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.<sup>58</sup>

#### 2. Protokol Kesehatan

Pasal 23A (1) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat. (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. Wajib menggunakan masker;
- b. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

<sup>57</sup> Melani Kartika Sari, "Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", *Jurnal karya Abdi*, Vol. 4(No.1), 2020, h. 80.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 80.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjaga jarak (Physical Distancing); dan
- d. Menghindari kerumunan.<sup>59</sup>

Berikut rangkuman proses pemungutan suara yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang dikutip dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020:

1. Pemilih antre di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan jarak aman.
2. Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
3. Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih.
4. Pemilih mengisi formulir Model C, daftar hadir-KWK, setelah menunjukkan Model C pemberitahuan-KWK serta KTP elektronik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4.
5. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak.
6. Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara.
7. Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.
8. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS 6.

<sup>59</sup> Perda Pemprov Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7.
10. KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
11. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
12. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya diimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS.<sup>60</sup>

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di beberapa negara, ada 55 Negara menunda Pemilu nasional ataupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada 21 negara yang tidak menunda Pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di tengah Pandemi Covid-19.

Pilkada serentak yang telah dilakukan mulai tahun 2005 untuk pertama kali dimana pada tahun ini dilakukan dengan kondisi berbeda. Hal tersebut dikarenakan sedang mewabahnya Virus Corona (Covid-19) yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Perkembangan Virus Corona (Covid-19) yang tak kunjung usai telah menimbulkan kepanikan terlebih terkait bagaimana suksesi pemimpin dan praktik demokrasi yang ada di Indonesia.<sup>61</sup>

Polemik muncul ketika secara resmi pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>61</sup> Yusuf Adam Hilman, "Peta Politik Pemilu Pilkada Kabupaten Ponorejo 2020 di tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, (No.2), 2020, h. 1.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Di satu sisi agenda politik terkait praktik demokrasi harus berkualitas dan juga diselenggarakan secara profesional, disisi lain harus ada pengawasan protokol kesehatan supaya penyelenggaraan Pilkada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>62</sup>

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak 2020 di tengah Pandemi covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif.

Dampak positif di antara lain sebagai berikut :<sup>63</sup>

a. Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana

Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun memang karena pandemi Covid-19 ini Pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undnag-Undang, yang mana terdapat pada pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”,

<sup>62</sup> Ibid., h. 1.

<sup>63</sup> Aprista Ristiyawati,” Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal crepido*, Vol. 2,(No.2), 2020,h. 88.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mana penundaan Pilkada Serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan Desember 2020.

b. Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi

Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum. Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak, maka Pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi Covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

c. Mengurangi praktik kepemimpinan Pemerintah Daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara.

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (PLT) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya para pejabat tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan dimasa Pandemi COVID-19 ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

d. Mencegah pembengkakan Anggaran<sup>64</sup>

Dampak lain yang perlu dipikirkan lagi jika pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini ditunda adalah Pembengkakan biaya. Pembengkakan yang dimaksud yaitu baik dari pemerintah maupun dari pasangan-pasangan calon Kepala Daerah yang mana sudah banyak mengeluarkan biaya operasional dalam melakukan

<sup>64</sup> Ibid., h. 88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi dan persiapan lainnya guna keperluan Pilkada. Anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.<sup>65</sup>

Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya Pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain :

a. Resiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi.

b. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan.

c. Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih karena alasan kesehatan dan keselamatannya).

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 90.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Upaya-upaya agar Pilkada Serentak 2020 Dapat Terlaksana Dengan baik :

Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

a. Upaya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan Pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme Pemilihan dan Protokol Kesehatan Covid-19.

b. Tetap menunjung Integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Dalam penyelenggaraan Pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan Pemilihan Kepala Daerah. Dari sisi peserta Pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan Pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam Pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak.

c. Harus ada Komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana

Penegakan disiplin Protokol Kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas Pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 ini.

d. Kedisiplinan Masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam Pilkada kemudian tidak mematuhi Protokol Kesehatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu kita harus cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah, Partai Politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan Pilkada dalam situasi Covid-19 dengan baik dan tetap aman.<sup>66</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 90.

## BAB V

### PENUTUP

#### B. Kesimpulan

- 1) Dapat disimpulkan Bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 berperan aktif dalam menjalankan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada upaya pencegahan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan demi mewujudkan pemilihan yang Demokratis dan berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.
- 2) Ada beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Pada masa Pandemi Covid'19 yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Pelalawan antara lain, kurangnya kesadaran hukum peserta para kadidat pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah rendah, Ketidaktahuan terkait aturan yang berlaku, karena itu partai politik punya peran melakukan pendidikan politik, Adanya berbagai cara dari pasangan calon untuk persaingan “konflik” yang dilembagakan dalam rangka merebut kekuasaan yang bersifat “persaingan” dalam Pemilihan Kepala Daerah, Kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, dan masyarakat belum mengetahui peraturan baru , yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020.





## Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, saran-saran peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum aturan lebih tegas dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat memberikan efek jera pemangku kepentingan. Kualitas demokrasi sangat ditentukan kerangka hukum yang jelas, tegas dan tidak memihak. Hal itu sangat penting mengingat pemilu merupakan konflik politik yang dilembagakan. Terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral sekaligus profesional.
2. Kepada seluruh masyarakat, harapannya agar dapat menjalankan pesta demokrasi dengan baik yang sesuai dengan aturan. Agar pesta demokrasi di Indonesia lebih berkualitas. Dengan hal ini diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada, agar terlaksananya nilai demokrasi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggrayni, L. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Huda, N. (2005). *Negara hukum, dan Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jokoabang. (2020, 6 1). Perubahan Ketiga UU No.1 th 2015 Pilkada serentak.
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kusnardi, M. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar bakti.
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mo, M. M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Cet.II Liberty.
- Moan, R. M. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Makasar: Keretakupa.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, T. (2019). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Hukum*. Jakarta: UUI Press.
- Surhartomo, E. (1994). *Teori Peran Konsep*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syukani Affan Gaffar, M. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintah.
- Timotius, k. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Torang Syamsir, (2014), *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Jakarta: Cet II Ghalia Indonesia.

## B. Jurnal

- Analisis Jurnal, (2017), Vol.6 No.2, 188-193.
- Haibuan, R. P. (2020). Urgensitas Perpu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Vol. 4, No.1, 2020*, 122.
- Riski, S. C. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. *Vol.4, No.2, 2020*, 145.
- Yuliana. (2020). Corona Virus diseases(covid-19) sebuah tinjauan Literature. *Vol. 2, No. 1 Februari 2020*, 188.
- Parwanto,(2020). Virus Corona(2019-nCoV) penyebab COVID-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3 (No.1), 2020, 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Mezani Kartika Sari, Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Jurnal karya Abdi, Vol. 4(No.1), 2020, 80.

Prista Ristyawati, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal crepido, Vol. 2,(No.2), 2020, 88.

Pety Fitiriana Hertika, (2019) Peran Bawaslu dalam menjalankan Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UMP, Vol.3, (No.2), 2019, 90.

#### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang tugas Badan Pengawas Kabupaten/Kota.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak 2020.

Perda Pemrov Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

#### D. Website

<https://law.unja.ac.id/pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-di-masa-pandemi/>

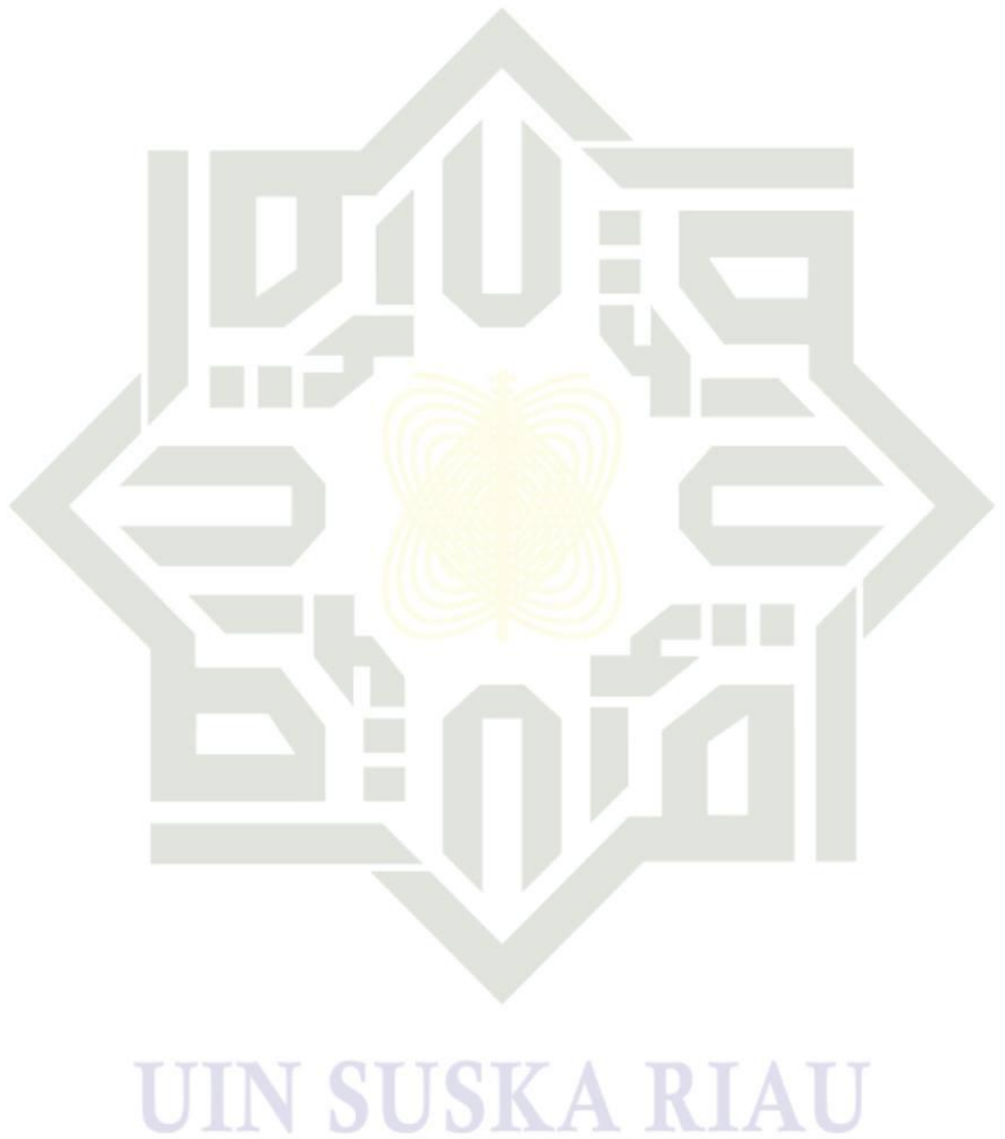
<https://pelalawan.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>

Organization. (2020, Maret 1). *World Health Organization*. Retrieved maret 1, 2020, from [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab_1).

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau** State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Zhou, W. (2020, Maret 1). *Coronaviruses Pandemic*. Retrieved Maret 1, 2020, from Hubei Science and technology Press: [https://www.who.int./health-topics/coronavirus#tab\\_1](https://www.who.int./health-topics/coronavirus#tab_1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID'19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)."* yang ditulis oleh :

Nama : **DIANA RIZKY**  
 NIM : 11727201272  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua

**Dr. Heri Sunandar, MCL**

Sekretaris

**H. Henrizal Hadi, LC., M.Si**

Penguji I

**Lysa Angraini, SH., M.H**

Penguji II

**Asril, SH., M.H**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalhus S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



### SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : DIANA RIZKY**

**NIM : 11727201272**

**FAKULTAS : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**Pembimbing: Basir, SHL., M.H.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. A. P. SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Februari 2021

No. 041/I/PP.00.9/2393/2021

(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: DIANA RIZKY
NIM	: 11727201272
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN  
PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID'19 DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Di arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Di arang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Di arang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Di arang menanggung dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul” PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID’19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN /ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) “ ditulis oleh saudara :

Nama : Diana Rizky

NIM : 11727201272

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada : Jum’at

Hari/ Tanggal : Jum’at / 19 Februari 2021

Narasumber : Helen Last Fitriani, S.H.,M.H

Telaah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Pekanbaru, 23 Februari 2021  
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Helen Last Fitriani, S.H.,M.H  
NIP.130217121

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipaparkan di publikasi lain tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmtsp.pelalawan@gmail.com  
 Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
 PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**  
**Nomor : 504/DPMTSP/2021/0082**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40631 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

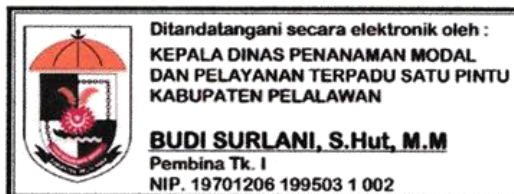
Nama : **DIANA RIZKY**  
 NIM / KTP : 11727201272  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **JL. MARKISA GG. KAMPE**  
 Judul Penelitian : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
 Lokasi Penelitian : **KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PANGKALAN KERINCI KOTA KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
 Pada tanggal 20 April 2021



**Tembusan :**

1. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40631  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/1/PP.00.9/2393/2021 Tanggal 24 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **DIANA RIZKY**
2. NIM / KTP : **11727201272**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PANGKALAN KERINCI KOTA KEC. PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Bupati Pelalawan

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**DIANA RIZKY**, lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 24 September 1998. Anak Kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda Maksum.,SE dan ibunda Yusmaini.,S.Sos. Memiliki 1 orang Kakak, Perempuan bernama Sumitha Syafitri.,SE.. Penulis menempuh Pendidikan formal di SD Negeri 007

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tahun 2006-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN I Pangkalan Kerinci pada tahun 2011-2014. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN I Pangkalan Kerinci dan lulus pada tahun 2017.

Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 dengan mengambil Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2019 penulis pernah melakukan magang di Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan bagian Pidana selain itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sering Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 15 Juli 2021 penulis dinyatakan Lulus, Dengan limpahan Rahmat Allah SWT dan berkat Do'a serta dukungan orang-orang tercinta, penulis dapat menyelesaikan Skripsi Sebagai tugas akhir perkuliahan.